

ABSTRAK

Penelitian dengan judul implementasi perjanjian kerja sama antara kemendagri, polri dan kejakung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah sebagai sebuah gebrakan produk hukum dalam pemenuhan konsentrasi memperbaiki jalannya birokrasi di tubuh pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data penelitian ini menggunakan data secara kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah dengan melihat praktek APIP dan APH dalam melaksanakan perjanjian tersebut. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dimana APIP dan APH memiliki peran tersendiri dan menghadapi hambatan yang berbeda pula. (3) Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut bahwa setiap ada hambatan dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum pasti ada solusi untuk melancarkan pelaksanaannya dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam penerapan sebuah hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

The research with the title of implementation of the cooperation agreement between the Ministry of Home Affairs, Indonesian National Police and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments as a breakthrough in legal products in fulfilling the concentration of improving the course of bureaucracy in regional government. Based on this, the author has a purpose in this study as follows: To find out and analyze the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments, To know and analyze the obstacles faced in implementing cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, the National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in regional governments, To find out and analyze solutions in overcoming obstacles to the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, the National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in regional governments.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach. The specifications in this study are descriptive analytical, where the data used is primary data, secondary data. Primary data is obtained from interview sources and field observations, then secondary data is sourced from literature studies and document studies. Analysis of this research data uses data qualitatively. The problem of this research was analyzed using law enforcement theory, justice theory, and supervisory theory.

Based on the results of research and discussion known: (1) To find out and analyze the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments by seeing the practice of Government Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials in implementing the agreement, (2) To find out and analyze the obstacles faced in implementing this cooperation agreement where Government Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials have their own roles and face different obstacles, (3) To find out and analyze solutions in overcoming obstacles in the implementation of the cooperation agreement that every obstacle from a law enforcement implementation there must be a solution to facilitate its implementation and be able to provide fair justice in the application of a law.

Keywords: Cooperation Agreements, Corruption, Regional Government.